

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial mengacu pada upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap individu dapat hidup layak dan sejahtera secara fisik, mental, sosial dan spiritual. Dalam konsep kesejahteraan sosial, kesejahteraan dipahami sebagai kondisi dimana individu merasa puas dan bahagia dalam kehidupan mereka. Memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dan layanan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Konsep kesejahteraan sosial juga mengandung nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap individu yang rentan dan miskin.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi sejahtera baik secara materi, spiritual dan kehidupan sosial yang dimiliki individu maupun masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, serta sosial tanpa melakukan penyimpangan sosial. Hal ini sesuai dengan undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 yang di kutip dalam fahrudin (2014:10) bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat mengembangkan fungsi.

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana warga negara dapat hidup dengan layak dan memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial mereka. Ini merupakan salah satu tujuan utama pembangunan sosial yang harus dicapai oleh pemerintah dan masyarakat. Kesejahteraan sosial yang baik dapat membantu individu dan kelompok dalam mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosial yang berbeda dalam masyarakat. Kebutuhan material meliputi hal-hal seperti sandang, pangan, dan papan, yang merupakan kebutuhan dasar setiap individu. Kebutuhan spiritual meliputi hal-hal seperti religi, filsafat, dan seni, yang dapat membantu individu dalam mencari arti dan tujuan dalam hidup. Sedangkan kebutuhan sosial meliputi hal-hal seperti komunikasi, interaksi sosial, dan perlindungan, yang dapat membantu individu dalam mengembangkan hubungan sosial yang baik.

Pengertian kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin Adi (2014:9) yaitu Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem fasilitas pelayanan sosial yang terorganisir yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka pengembangan kapasitas dan kesejahteraan sosial benar-benar tepat untuk kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dan dirancang untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai standar hidup yang memadai dan kesehatan yang baik. Sistem ini juga memungkinkan individu dan kelompok untuk mengembangkan kapasitas dan

hubungan sosial yang baik, yang dapat membantu mereka dalam mencapai kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Kesejahteraan sosial merupakan keseluruhan fasilitas yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial.

Kesejahteraan sosial juga merupakan ilmu yang lahir untuk memecahkan masalah sosial individu, kelompok dan masyarakat. Sebagai suatu disiplin ilmu, kesejahteraan terus mengembangkan pemikiran dan teknik strategis dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan. Adapun kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2014:17) yaitu:

“Kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.”

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, seperti pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan sebuah ilmu terapan yang memiliki berbagai tujuan agar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada. Adapun menurut Fahrudin (2014:10) tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber peningkatan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu untuk membantu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan tercapainya kebutuhan kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang menjadi kebutuhan dasarnya, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat agar dapat berperan serta menjalankan fungsi-fungsi sosial didalam lingkungannya. Menurut Fahrudin (2012:12) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yaitu fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, dan penunjang:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi- kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan atau rehabilitasi.

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan serta fungsi penunjang. Fungsi pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya masalah sosial sebelum masalah tersebut muncul dalam masyarakat. Fungsi penyembuhan dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Fungsi pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan peningkatan pada masyarakat melalui pemberdayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, fungsi penunjang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan bidang-bidang kesejahteraan

sosial lainnya.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut *International Federation Of Social Worker (IFSW) Dubois & Miley, 2005: 4.*

“pekerjaan sosial (*social work*) adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya”(Miftachul Huda, 2009)

Dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam definisi lain yang disebutkan oleh (Zastrow, 1999: 5) didalam buku pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial disebutkan bahwa pekerjaan sosial merupakan sebuah aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya.

Layaknya dokter atau guru, sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh 3 komponen penting, yakni kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skill*) dan kerangka nilai (*body of value*). Secara integratif, ketiganya menjadi dasar yang sangat penting dalam praktik ilmu pekerjaan sosial. Dimana pengetahuan menggambarkan luasnya penguasaan materi yang dimiliki oleh seorang pekerja sosial, keahlian menunjukkan kematangan dalam praktik

(pengalaman) dan nilai menjadi kerangka etis yang menuntun seorang pekerja sosial agar tidak jatuh pada mala praktik (praktik yang salah) dalam melakukan intervensi sosial.

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu disiplin ilmu yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh manusia, artinya, secara praktik pekerjaan sosial sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan setiap masyarakat. Walaupun demikian, perlu diakui bahwa secara definitif, pekerjaan sosial relatif kurang di kenal oleh mayoritas masyarakat indonesia.

Kurang dikenalnya ilmu pekerjaan sosial mungkin dapat dipahami, sebab ilmu ini lahir dan berkembang di barat. Tetapi bukan berarti pekerjaan sosial tidak relevan berkembang di indonesia, sebab fokus kajian pekerjaan sosial adalah membantu individu, kelompok, keluarga atau masyarakat yang mengalami kesulitan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kurang populernya profesi ini di indonesia, beberapa diantaranya: pertama, istilah yang dipakai kurang spesifik dan kurang tegas. Istilah spesifik dan tegas ditunjukkan misalnya pada profesi dokter (pada dunia kedokteran) atau profesi guru (pada dunia pendidikan). Tetapi, pekerjaan sosial (*social worker*) justru identik dengan kegiatan sukarela dan tidak profesional. Karena itulah banyak kalangan yang berusaha mencari istilah yang tepat bagi pekerja sosial ini.

Contohnya Edi Suharto (2006:24) mencoba menamakan pekerjaan sosial sebagai *sosiawan* atau *sosiater*. Sekalipun demikian, belum banyak penekun ilmu ini secara masif menggunakan istilah tersebut.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pada awalnya, sebagai mana yang telah dikatakan oleh *The National Association Of Social Workers (NASW)* pekerjaan sosial mempunyai empat tujuan utama, namun belakangan *The Council on Social Work Education* menambah dua tujuan pekerjaan sosial sehingga menjadi enam poin penting.

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya. Seseorang yang sedang mengalami masalah sering kali tidak memiliki kesadaran bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, pekerja sosial berperan dalam mengidentifikasi kekuatan klien dan mendorongnya untuk dapat melakukan perubahan pada kehidupannya sendiri. Kesadarann tentang kekuatan yang ada pada diri klien inilah yang menimbulkan suatu nilai terkenal yang di junjung tinggi dalam pekerjaan sosial, yait *self determination* (keputusan oleh diri sendiri). Pekerja sosial dalam konteks ini dapat berperan sebagai konselor, pendidik, penyedia layanan ataupun perubah perilaku.
2. Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan. Ibarat memancing yang tidak cukup hanya diberikan kailnya saja, dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini tentu sekaligus harus memberikan pelatihan skill

tertentu (misalnya kewirausahaan) kepada rakyat miskin mungkin sudah cukup menyelesaikan problem kemiskinan. Dalam hal ini pekerja sosial berfungsi strategis dalam advokasi sosial maupun menghubungkan klien kepada jaringan-jaringan sumber yang dibutuhkan oleh seorang klien untuk dapat berkembang mencapai tujuan didalam kehidupannya. Menjadi broker adalah suatu peran strategis yang dapat dimainkan oleh pekerja sosial untuk mencapai tujuan ini.

3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif. Pekerja sosial berperan dalam menjamin agar lembaga-lembaga sosial dapat memberikan pelayanan kepada klien secara merata dan efektif. Langkah ini dapat dilakukan karena lembaga-lembaga sosial dianggap sebagai salah satu lembaga untuk mencapai tujuan-tujuan dari disiplin ilmu pekerjaan sosial. Peran-peran yang dilakukan pekerja sosial antara lain, pengembangan program, supervisor, koordinator maupun konsultan.

Sebagai supervisor, pekerja sosial dapat meningkatkan kinerja pelayanan lembaga sosial melalui supervisi yang dilakukan teradap staf-stafnya. Sedangkan dalam konteks koordinator, pekerjaan sosial dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara sumber-sumber pelayanan kemanusiaan. Memandu lembaga sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat diperankan oleh pekerja sosial sebagai konsultan.

4. Mendorong terciptanya keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial yang berpihak. Disinilah pekerjaan sosial memiliki ikatan yang erat dengan kesejahteraan sosial maupun dengan kebijakan sosial. Yang pertama sebagai tujuan

akhirnya sedangkan yang kedua sebagai salah satu alat untuk mencapainya. Keduanya berada dalam wilayah kajian pekerjaan sosial. Pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana (*planner*) atau pengembang kebijakan (*policy developer*).

5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Kelompok rentan yang dimaksud disini seperti orang lanjut usia (lansia), kaum perempuan, orang yang cacat fisik maupun mental, orang pengidap HIV/AIDS (ODHA), dan kelompok marjinal lainnya.

Lazimnya, kelompok rentan seperti ini sangat rentan terhadap pengabaian hak-haknya sehingga perlu dilindungi agar memperoleh hak-haknya secara memadai. Selain itu juga diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada mereka untuk memperoleh hak-hak keadilan secara ekonomi. Misalnya peluang untuk memperoleh pekerjaan atau pelayanan kesehatan, sebab tidak jarang kelompok rentan seperti ini kurang mendapat perhatian dalam hak-haknya secara ekonomi.

6. Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan profesional. Pekerjaan sosial diharapkan memiliki dasar-dasar keterampilan dan pengetahuan yang mencukupi praktiknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar praktik pekerjaan sosial yang dilakukan tidak menyimpang dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat. (Miftachul Huda, 2009)

Dari yang sudah disebutkan diatas, tentu saja pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk membantu individu, komunitas dan masyarakat menyelesaikan masalah-masalah sosialnya, serta melindungi kelompok-kelompok rentan.

2.2.3 Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial

2.2.3.1 Nilai-nilai Pekerjaan Sosial

Dalam kaitannya dengan nilai dan prinsip-prinsip dasar, Zastrow (2010) melihat ada tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan dan dielaborasi dalam mengembangkan profesi praktisi dibidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ketiga komponen dasar tersebut diantaranya adalah :

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Menurut pendapat Kahn (1969) *knowledge* adalah pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan; belajar dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktik serta pengembangan keterampilan yang harus dimiliki. Untuk melihat apakah suatu *knowledge* itu benar atau salah, cara untuk membuktikannya adalah kajian berdasarkan kajian terhadap dunia empirik melalui cara pengkajian ilmiah.

b. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi pemberi bantuan (*helping profession*) dan menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan, keahlian atau kemahiran yang diperoleh dari praktik dan pengetahuan, keterampilan tidak muncul dari proses uji coba belaka, akan tetapi keterampilan muncul karena ada kaitannya

dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh seseorang. Oleh karena itu, semakin seseorang mempelajari pengetahuan yang terkait dengan praktik yang ia hadapi sehari-hari, maka semakin miskin pula variasi alternatif penanganan masalah yang akan ia berikan.

Dalam bidang kesejahteraan sosial pun pengetahuan dan latihan praktik menjadi prasyarat berkembangnya keterampilan seorang pekerja sosial dalam menangani klien mereka, baik di level individu, keluarga, kelompok, organisasi maupun komunitas.

c. Nilai (*value*)

Pincus dan Minaha (1973: 38) menyatakan nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang di inginkan atau dianggap baik oleh manusia (*Values an beliefs, preferences or assumptions about what is desirable or good for humans*). Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Nilai-nilai dasar ilmu kesejahteraan sosial sendiri pada awalnya banyak dipengaruhi oleh nilai yang berkembang pada profesi yang memberikan bantuan kepada masyarakat.

2.2.3.2 Etika Pekerjaan Sosial

Dalam perkembangan ilmu kesejahteraan sosial, prinsip dasar yang diadopsi masih sangat terikat dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Terutama ketika para praktisi melakukakn intervensi pada level mikro dan mezzo.

Henry Maas (1977) mengemukakan enam prinsip dasar dalam praktik pekerjaan sosial, yaitu:

1. Penerimaan (*Acceptance*)

Seorang pekerja sosial atau seorang praktisi harus berusaha menerima klien mereka apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut. Kemampuan praktisi untuk menerima klien dengan apa adanya akan sangat dapat banyak membantu perkembangan relasi antara praktisi dan klien. Karena klien akan merasa di terima keberadaannya dan membuat klien nyaman.

Oleh karena itu, sebagai seorang praktisi tidak boleh menghakimi penampilan fisik klien, contohnya apabila ada seorang klien yang datang dengan pakaian yang lusuh, lalu sebagai praktisi bertindak secara tidak profesional dengan menghakimi dan mengucapkan kalimat yang menyudutkan, dan tidak boleh membedakan perlakuan terhadap kliennya.

Apabil ada klien yang berpenampilan lusuh datang, sikap kita menghakimi dan menyudutkan klien itu karena penampilannya, sedangkan ada klien yang datang berpakaian rapih, praktisi menerimanya dengan baik dan bersikap sebaik mungkin kepada klien tersebut.

Padahal dalam prinsip *acceptence* ini penerimaan seorang praktisi harus berusaha meredam perasaan 'suka' dan 'tidak suka' yang terlihat pada penampilan fisik seseorang. Dengan begitu, klien akan merasa lebih percaya diri, tidak kaku dan lebih terbuka dalam berbicara dengan praktisi.

2. Komunikasi (*communication*)

Prinsip berkomunikasi ini berkaitan erat dengan kemmpuan praktisi untuk menangkap informasi ataupun pesan yang disampaikan oleh klien. Pesan yang

disampaikan klien tersebut dapat berupa pesan verbal atau pesan yang disampaikan melalui ucapannya, ataupun pesan non-verbal yaitu dapat dilihat dari cara duduk klien, menggerakkan tangan, meletakkan tangan dan sebagainya.

Jika dibeberapa kesempatan klien tidak dapat mengungkapkan perasaan yang di rasakan, praktisi diharapkan dapat membantu klien untuk mengungkapkan perasaannya itu.

3. Individualisasi (*individualisation*)

Prinsip ini pada intinya menganggap setiap individu itu berbeda antara individu yang satu dengan lainnya, oleh karena itu seorang praktisi diharapkan dapat memahami keunikan dari setiap klien. Dengan adanya prinsip ini, maka praktisi diharapkan tidak menyamaratakan setiap klien.

Selain itu, dari prinsip ini juga muncul pandangan agar praktisi tidaklah memasukan klien kedalam stereotipe tertentu dan terjebak dalam stereotipe tersebut dan prinsip ini juga mengharuskan praktisi untuk melakukan observasi lebih mendalam.

4. Partisipasi (*participation*)

Dalam prinsip ini, praktisi didorong menjalankan peran sebagai fasilitator, dan dari peran ini praktisi diharapkan dapat mengajak kliennya untuk berpartisipasi aktif dalam menghadapi permasalahan yang akan dihadapinya. Dalam prinsip ini juga tergambar bahwa perbaikan kondisi seseorang bukanlah hanya hasil kerja dari praktisi itu sendiri, melainkan ada peran rasa tanggung jawab dan keinginan dari diri klien itu sendiri untuk memperbaiki kondisinya.

5. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Pada prinsip ini praktisi diharuskan dan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan kliennya dari kasus yang sedang di tangannya, sehingga kasus itu tidak dibicarakan kesembarang orang dan menjadi tersebarluaskan. Praktisi hanya boleh membahas kasus tersebut apabila sedang dibahas dalam suatu tim kerjanya.

Dengan dijaminnya kerahasiaan klien, maka klien akan merasa lebih percaya dan lebih bebas untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang ia hadapi dan klien akan merasa lebih aman untuk mengungkapkan perasaannya karena ia percaya apa yang telah ia ceritakan tidak akan tersebar dan akan tetap dijaga kerahasiaannya.

6. Kesadaran diri petugas (*worker self-awareness*)

Prinsip kesadaran diri ini menuntut praktisi untuk bersikap profesional dalam menjalin relasi dengan kliennya, yang berarti klien harus dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh perasaan ataupun permasalahan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Praktisi dituntut untuk dapat mengontrol dirinya agar dapat menciptakan relasi yang profesional. (Isbandi Rukminto Adi, 2013).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keenam prinsip tersebut memiliki saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dapat diibaratkan seperti enam cairan yang dimasukkan kedalam 1 wadah lalu di aduk, maka cairan tersebut akan menyatu dan saling membaaur didalam diri praktisi tersebut.

2.2.4 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial mencakup masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Karena cakupan yang berbeda ini, pekerjaan sosial terbagi

pada tiga level, *mikro* (individu), *mezzo* (keluarga dan kelompok kecil), *makro* (organisasi atau masyarakat). Dimasing-masing bidang garapan ini, pekerjaan sosial memiliki metode yang berbeda dalam penanganannya. Di level *mikro* dikenal dengan *case work* (terapi perseorangan), dalam level *mezzo* dikenal dengan *group work* (terapi kelompok) dan *family therapy* (terapi keluarga), dan pada level *makro* dikenal dengan *community development* (pengembangan masyarakat) atau *policy analysis* (analisis kebijakan) (Miftachul Huda, 2009).

1. Case Work

Metode *Case Work* merupakan suatu metode bantuan kepada perseorangan yang berdasarkan atas pengetahuan, pemahaman dan penggunaan teknik-teknik keterampilan yang diterapkan untuk membantu orang-orang guna memecahkan masalahnya serta mengembangkan dirinya. Metode *case work* ini berifat individual, karena itu juga metode ini disebut juga dengan pendekatan mikro. Yaitu membantu individu-individu yang mempunyai masalah, baik masalah internal, yaitu masalah-masalah yang bersumber dari dalam dirinya sendiri maupun masalah eksternal, yaitu masalah-masalah yang berasal dari lingkungan sosialnya.

2. Group Work

Metode *group work* merupakan suatu metode untuk bekerja menghadapi orang-orang yang berada didalam sebuah kelompok yang memiliki masalah, dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya dan mencapai tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik (Soetarso, Pengantar Kesejahteraan Sosial, 1976: 72).

Bimbingan Sosial Kelompok ini didasarkan atas pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia untuk berhubungan satu sama lain, dan adanya saling ketergantungan di antara mereka. Kelompok itu sendiri didalam perspektif pekerjaan sosial dipandang sebagai sekumpulan orang yang memiliki interaksi antara satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan yang terpisah dan berbeda dari satu kesatuan lainnya.

3. *Community development*

Community development ini pada awalnya sebenarnya adalah pengorganisasian masyarakat (*Community Organization*) yang berarti mengorganisasikan masyarakat sebagai sebuah sistem untuk melayani warganya dalam *setting* kondisi yang terus berubah. Dalam kata lain yang berarti mendorong masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kesejahteraannya sendiri.

PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat (*Community Development*) sebagai berikut:

“Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri”.

(WIBHAWA et al., 2015).

2.2.5 Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Sekalipun perspektif kekuatan berasumsi bahwa klien sebagai pihak yang kuat

dan memiliki potensi dalam proses penyembuhan tetap saja memerlukan kolaborasi dari profesi lainnya, seperti dokter, psikiater dalam konteks klinis atau ekonom, politikus, pengacara dalam konteks makro (kebijakan dan hukum). Namun demikian, kolaborasi yang dibutuhkan oleh pekerja sosial ini dalam waktu yang bersamaan justru dapat melahirkan tentang keraguan profesi pekerjaan sosial.

Flexner lantas membuat suatu kesimpulan menarik bahwa pekerjaan sosial belum dapat dianggap sebagai sebuah profesi. Karena menurutnya, pekerjaan sosial tidak memiliki garis demarkasi yang tegas dengan profesi lainnya. Misalnya, aspek medis, psikolog, hukum, pendidikan bahkan arsitektur juga dianggap dalam wilayah pekerjaan sosial.

Kesimpulan dari flexer ini memang dapat dipahami, sebab kolaborasi dari profesi lain memang dilakukan oleh pekerja sosial sebab sangat dibutuhkan dalam proses penyembuhan terhadap klien. Ketika pekerja sosial menghadapi seorang klien yang sedang mengalami trauma berat, misalnya korban bencana alam, bagaimana pun sangat dianjurkan untuk merujuk klien kepada psikolog atau profesi lain yang lebih ahli untuk membantu klien dalam proses penyembuhannya. Akan tetapi sangat disayangkan, kebutuhan akan adanya kolaborasi itu justru melahirkan keraguan tentang profesionalisme pekerjaan sosial sebagaimana dalam pandangan Flexner. Meskipun begitu, Flexer memiliki batasan yang ketat untuk suatu entitas dapat disebut sebagai profesi atau profesional. Menurut Flexer, paling tidak ada enam kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi profesional.

Pertama, suatu profesi harus mencakup esensi intelektualitas dengan tanggung jawab individual yang besar. Kedua, ‘bahan baku’ keilmuannya berasal dari ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Bagaimana pun suatu profesi harus dilandasi oleh aktivitas intelektual yang berasal dari pengalaman-pengalaman dan pembelajaran ilmiah. Ketiga, ‘bahan baku’ tersebut melahirkan praktik dan tujuan akhir yang jelas. Keempat, memiliki teknik yang dapat ditularkan secara terdidik. Kelima, cenderung mampu mengorganisasikan diri sendiri. Keenam, memiliki motivasi untuk membantu orang lain dari pada kerja “mata duitan”.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas menurut Flexner, meskipun saat itu belum dapat di sebut sebagai sebuah profesi, pekerjaan sosial sudah memiliki ciri-ciri di atas sehingga pekerjaan sosial pada masa kini sudah dapat dikategorikan menjadi sebuah pofesi yang profesional. Misalnya, pekerjaan sosial diakui sebagai suatu aktivitas sosial yang terdidik, berlandaskan intelektualitas dan ilmu pengetahuan.

Seperti yang dikatakan oleh Ernest Greenwood pada tahun 1957 didalam artikelnya yang berjudul “*Attributes of a Proffesion*” Greenwood menyebutkan pada masa itu pekerjaan sosial sudah layak di sebut sebagai profesi. Greenwood mengajukan beberapa kriteria profesionalisme, dan menurutnya pekerjaan sosial sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut. dewasa.(Miftachul Huda, 2009)

Adapun kriteria-kriteria yang diajukan oleh Greenwood (DuBois & Miley, 2005: 44; Skidmore, et.al., 1991: 312) antara lain:

1. Adanya teori yang sistematis. Suatu profesi mempunyai pengetahuan yang fundamental dan mengembangkan teori secara sistematis yang digunakan sebagai dasar praktik.
2. Otoritas. Kredibilitas dan otoritas profesional dalam hubungannya dengan klien didasarkan kepada kompetensi dan keputusan yang profesional.
3. Peretujuan umum. Suatu profesi berarti berdaya, baik untuk mengatur maupun mengontrol anggotanya, praktik profesional, pendidikan dan standar penampilan.
4. Kode etik. Suatu profesi mempunyai pelaksanaan yang eksplisit, sistematis dan mengikat perilaku anggotanya dengan kode etik.
5. Adanya kultur. Suatu profesi di tuntun oleh budaya, norma dan simbol dengan jaringan yang terorganisir dari kelompok formal maupun informal melalui fungsi profesi dan pelayanannya.

Sedangkan dalam pandangan tokoh lain, seperti William Wickenden (Skidmore, et.al, 1991) mengajukan empat kriteria profesi, diantaranya:

1. Tipe aktivitas yang ditandai dengan tanggung jawab individu yang besar.
2. Motif pelayanan yang digerakkan oleh kesadaran moral dan bukan mengejar profit.
3. Motif ekspresi diri yang cerdas dan mengesankan.
4. Adanya kesadaran bahwa yang dilakukannya adalah sebagai kewajiban sosial.

Sedangkan kualifikasi dari pekerja sosial profesional yang sudah tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang kesejahteraan sosial pasal 33 ayat 2 adalah :

1. Pendidikan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial.
3. Pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Dengan demikian pula, untuk konteks saat ini pekerjaan sosial sudah dapat dipandang sebagai suatu aktivitas yang profesional. Terlebih di negara-negara berkembang, profesi pekerjaan sosial menjadi suatu kebutuhan yang cukup mendesak. Seperti contohnya di Indonesia yang memiliki banyak sekali permasalahan sosial, pekerjaan sosial menjadi amat penting dan menjadi kebutuhan yang mendesak. Sebab, sebagaimana fungsinya, pekerjaan sosial memiliki fokus tujuan untuk membantu orang yang mengalami kesulitan agar mampu meningkatkan peran sosialnya agar berjalan dengan baik. Seperti orang yang kesulitan terhadap akses ekonomi, ataupun kesulitan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya karena alasan tertentu.

Kabar yang menggembirakan juga bahwa, akhir-akhir ini pekerja sosial telah menjadi profesi yang dihargai di Indonesia. Inipun terlihat pada undang-undang tentang kesejahteraan sosial yang sudah disahkan oleh DPR RI pada 18 Desember 2008. Dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa “Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

2.3 Keluarga dan Pola Asuh

2.3.1 Keluarga

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal. Salah satu ilmuwan yang mengkaji keluarga adalah George Murdock. Dalam bukunya *Social Structure*, Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi dan terjadi proses reproduksi (Murdock, 1965).

Sedangkan menurut Ascan F. Koerner dan Mary Anne Fitzpatrick (2004), definisi mengenai keluarga setidaknya dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu definisi structural, definisi fungsional dan definisi interaksional.

1. Definisi struktural

Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (*Families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*Families Of Procreation*) dan keluarga batih (*Extended Family*).

2. Definisi fungsional

Keluarga di definisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi

pada anak, dukungan emosi dan materi dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.

3. Definisi transaksional

Keluarga di definisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman history maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. (Sri Lestari, 2012)

Dalam proses perkembangan, konflik mendorong proses kematangan pribadi sekaligus merupakan hasil dari proses kematangan tersebut. Konflik dalam teori perkembangan manusia digunakan baik untuk proses intrapsikis, atau intrapersonal maupun interpersonal. Dalam perspektif Freud, konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan antara hasrat individu dan tuntutan masyarakat dan aturan, sehingga menimbulkan kecemasan dan pertahanan diri terhadap kecemasan. Erikson kemudian menjelaskan juga bahwa konflik terjadi dalam 3 level, level pertama konflik yang terjadi antara kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat, level kedua adalah konflik yang terjadi dalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya dan level ketiga adalah konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi.

2.3.2 Konflik Orang Tua dan Anak

Secara naluriah, orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan

dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif yang demikian seharusnya konflik antara orang tua dan anak tidak seharusnya terjadi, karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun, dalam hubungan orang tua dengan anaknya juga sering kali mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespon kebutuhan anak, juga terdapat aspek tuntutan yang mencerminkan kebutuhan orang tua terhadap sikap perilaku anaknya. Sehingga pada akhirnya hubungan orang tua dan anaknya pun biasanya diwarnai dan dibumbui dengan berbagai konflik. Sumber utama konflik pada umumnya adalah ketidakcocokan antara perspektif anak dan perspektif orang tua.

Konflik dalam hubungan antar pribadi (misal dengan teman kerja, tetangga, suami/istri, orangtua/anak) merupakan sesuatu yang tidak bisa terelakan atau tidak bisa dihindari, bahkan semakin tinggi ketergantungannya atau semakin dalam hubungannya, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya konflik. Jadi, semakin dekat hubungannya maka semakin berpotensi untuk terjadi konflik (Dwyer, 2000)

2.3.3 Pengertian Pola Asuh

Pengasuhan merupakan suatu proses perbuatan atau cara pengasuhan. Kata “asuh” mencakup semua aspek yang berkaitan dengan merawat, mendidik, membantu anak mengembangkan kemandiriannya sehingga anak tersebut dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan tanpa bergantung kepada orang lain. Sedangkan pengasuh merupakan orang yang melaksanakan tugas mengasuh, mendidik, memimpin dan membimbing anak.

Konflik dalam hubungan antar pribadi (misal dengan teman kerja, tetangga, suami/istri, orangtua/anak) merupakan sesuatu yang tidak bisa terelakan atau tidak bisa dihindari, bahkan semakin tinggi ketergantungannya atau semakin dalam hubungannya, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya konflik. Jadi, semakin dekat hubungannya maka semakin berpotensi untuk terjadi konflik (Dwyer, 2000)

Pola asuh adalah cara mendidik atau membina anak yang diberikan oleh orang tua terhadap anak. Pola asuh dapat memberikan dampak psikologis dan sosial bagi anak. Pengasuhan anak dapat memberikan dampak negatif negatif atau positif tergantung dari pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Dikarenakan dalam tindakan pengasuhan ini, orang tua memberikan perhatian, aturan, disiplin, penghargaan dan hukuman, serta respon terhadap keinginan anaknya. Yang kemudian secara sadar atau tidak sadar anak tersebut mengikuti kebiasaan orang tuanya tersebut.

2.3.4 Jenis-jenis Pola Asuh

Menurut Hurlock (1999) yang dikutip didalam buku Adawiah (2017) membagi pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Pola Asuh Permisif Pola asuh permisif dapat diartikan sebagai pola perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak, yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin di lakukan tanpa mempertanyakan. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan-aturan yang ketat bahkan bimbingan pun kurang diberikan, sehingga tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak.

Kebebasan diberikan penuh dan anak diijinkan untuk memberi keputusan untuk dirinya sendiri, tanpa pertimbangan orang tua dan berperilaku menurut apa yang diinginkannya tanpa ada kontrol dari orang tua. Gunarsa (2002) dalam Adawiah (2017) mengemukakan bahwa orang tua yang menerapkan pola asuh permisif memberikan kekuasaan penuh pada anak, tanpa dituntut kewajiban dan tanggung jawab, kurang kontrol terhadap perilaku anak dan hanya berperan sebagai pemberi fasilitas, serta kurang berkomunikasi dengan anak. Dalam pola asuh ini, perkembangan kepribadian anak menjadi tidak terarah, dan mudah mengalami kesulitan jika harus menghadapi larangan-larangan yang ada di lingkungannya.

Prasetya dalam (Adawiah, 2017) menjelaskan bahwa pola asuh permissif atau biasa disebut pola asuh penelantar yaitu di mana orang tua lebih memprioritaskan kepentingannya sendiri, perkembangan kepribadian anak terabaikan, dan orang tua tidak mengetahui apa dan bagaimana kegiatan anak sehari-harinya. Dariyo dalam Adawiah (2017) juga mengatakan bahwa pola asuh permissif yang diterapkan orang tua, dapat menjadikan anak kurang disiplin dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. Namun bila anak mampu menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab, maka dapat menjadi seorang yang mandiri, kreatif, dan mampu mewujudkan aktualitasnya.

2. Pola Asuh Otoriter Menurut Gunarsa (2002) dalam Adawiah (2017), pola asuh otoriter yaitu pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat, jika anak tidak mematuhi akan diancam dan dihukum. Pola asuh otoriter ini dapat

menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada anak, inisiatif dan aktivitasnya menjadi kurang, sehingga anak menjadi tidak percaya diri pada kemampuannya. Senada dengan Hurlock, Dariyo (Adawiah, 2017), menyebutkan bahwa anak yang dididik dalam pola asuh otoriter, cenderung memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang semu.

3. Pola Asuh Demokratis Gunarsa (2000) dalam Adawiah (2017) mengemukakan bahwa dalam menanamkan disiplin kepada anak, orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak, dengan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua, memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Dalam pola asuh ini, anak tumbuh rasa tanggung jawab, mampu bertindak sesuai dengan norma yang ada. Dariyo (Adawiah, 2017) mengatakan bahwa pola asuh demokratis ini, di samping memiliki sisi positif dari anak, terdapat juga sisi negatifnya, di mana anak cenderung merongrong kewibawaan otoritas orang tua, karena segala sesuatu itu harus dipertimbangkan oleh anak kepada orang tua.

Dalam praktiknya di masyarakat, sebuah keluarga biasanya tidak menggunakan pola asuh yang tunggal, dalam kenyataan ketiga pola asuh tersebut digunakan secara bersamaan di dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan anaknya, ada kalanya orang tua menerapkan pola asuh otoriter, demokratis dan permissif. Dengan demikian, secara tidak langsung tidak ada jenis pola asuh yang murni diterapkan dalam keluarga, tetapi orang tua cenderung menggunakan ketiga pola asuh tersebut. (adawiah, R, 2017)

2.3.5 Pola Interaksi Orang Tua – Anak

Sesuai dengan tahap perkembangannya, interaksi remaja dengan orang tua memiliki kekhasan tersendiri. Jersild, Brook dan Brook (1998) mengatakan bahwa interaksi antara remaja dengan orang tua dapat digambarkan sebagai drama tiga tindakan (*three-act-drama*).

Jadi, disini yang dimaksud dengan interaksi remaja –orang tua adalah hubungan timbal balik secara aktif antara remaja dengan orang tuanya yang terwujud dalam kualitas hubungan yang memungkinkan remaja untuk mengembangkan potensi dirinya.

2.4 Remaja dan Perkembangan

2.4.1 Pengertian Remaja

Menurut Mappiare (1982) dalam buku psikologi remaja, masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja inidapat dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah masa remaja akhir. Menurut hukum di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap telah menjadi dewasa apabila telah mencapai usia 18tahun, dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya dari Hurlock, 1991.

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *Adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan”. Masa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan priode lain dalam rentang kehidupan. Anak di anggap sudah dewasa apabila

sudah mampu mengadakan reproduksi. (prof. Dr. Mohammad Ali & Prof. Dr. Mohammad Asrori, 2018)

Remaja merupakan suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana bahwa individu tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau sejajar. Fase remaja ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas, mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak tetapi mereka juga belum termasuk kedalam golongan orang dewasa. Remaja berada di fase antara anak-anak dan dewasa, maka dari itu remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri”. Remaja belum mampu memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya.

2.4.2 Fase Remaja

Menurut Konopka (Pikunas, 1976), masa remaja ini meliputi (a) remaja awal: 12-15 tahun, (b) remaja madya: 15-18 tahun (c) remaja akhir: 18-22 tahun. sementara salzaman mengemukakan bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung terhadap orang tua kearah kemandirian, minat-minat seksual, perenungan diri dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.

G.Stanley Hall merupakan ahli psikologi dan pendidikan yang merupakan salah seorang “*Father of Adolesence*” dia meyakini melalui mekanisme evolusi, remaja dapat memperoleh sifat-sifat tertentu melalui pengalaman hidupnya yang kritis. Apabila remaja berkembang dalam lingkungan yang kondusif, mereka akan memperoleh sifat-sifat positif yang mengembangkan nilai-nilai insaninya.

Disisi lain, Hall juga berkeyakinan bahwa perkembangan setiap individu merupakan proses pembaruan sejarah kemanusiaan. Hall berpendapat bahwa remaja merupakan masa "*strum and Drang*" yaitu sebagai periode yang berada dalam dua situasi antara goncangan, penderitaan, asmara dan pemberontakan dengan otoritas orang dewasa. Selanjutnya ia juga mengemukakan bahwa pengalaman sosial selama remaja dapat mengarahkannya untuk menginternalisasi sifat-sifat yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Sedangkan Roger Barker berbeda pendapat dengan G. Stanley Hall yang menekankan orientasinya atas dasar genetika. Disini, Braker menekankan orientasinya kepada sosio-psikologis. Karena masa remaja merupakan periode pertumbuhan fisik yang cepat dan peningkatan dalam koordinasi, maka remaja merupakan masa transisi antara antara masa anak dan dewasa. Dia berpendapat bahwa pertumbuhan fisik sangat berpengaruh kepada perkembangan individu.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, masa remaja merupakan masa peralihan, dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Dimana masa ini merupakan masa penuh dengan konflik.

2.4.3 Pertumbuhan dan Perkembangan

Istilah pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu serta berlangsung dalam periode tertentu. Oleh karena itu, sebagai hasil dari pertumbuhan adalah berkembangnya berat, panjang atau tinggi badan, tulang dan otot-otot menjadi lebih kuat, lingkaran tubuh menjadi lebih besar dan organ tubuh menjadi lebih sempurna.

Sedangkan perkembangan lebih mengacu kepada pertumbuhan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Para ahli psikologis pada umumnya menunjuk pada pengertian perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Menurut Berk (1989) Perubahan kemampuan dan karakteristik psikis sebagai hasil dari perubahan dan kesiapan struktur biologis juga sering dikenal dengan istilah “kematangan”.

Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Disini, yang dimaksud dengan sistematis, progresif dan berkesinambungan adalah sebagai berikut:

- a. Sistematis, berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme (fisik – psikis) dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini adalah seperti kemampuan berjalan anak seiring dengan matangnya otot-otot kaki dan keinginan remaja untuk memperhatikan jenis kelamin lain seiring dengan matangnya organ-organ seksualnya.
- b. Progresif, berarti perubahan yang bersifat maju, meingkat dan mendalam baik secara fisik maupun psikis. Contohnya seperti perubahan proporsi dan ukuran fisik anak serta bertambahnya ilmu pengetahuan.

- c. Berkesinambungan, yang berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan. Tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat, contohnya untuk dapat berdiri, seorang anak harus menguasai tahapan sebelumnya seperti duduk dan merangkak.

2.4.4 Teori Perkembangan

2.4.4.1 Erik Erikson (1902-1994)

Erik Erikson menganggap bahwa manusia melakukan sesuatu tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan seksual belaka, namun juga sosial. Dalam teori perkembangan kepribadian, Erik Erikson mengatakan bahwa individu berkembang dalam tahap-tahap psikososial yang menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia.

Menurut teori psikososial erikson, masing-masing tahap psikososial memiliki tugas perkembangan yang khas dan mengharuskan individu menghadapi dan menyelesaikan krisis. Erikson melihat krisis tersebut sudah ada sejak lahir, tapi pada saat-saat tertentu dalam siklus kehidupan, krisis menjadi dominan dan bagi erikson sendiri, krisis bukanlah suatu bencana, akan tetapi suatu titik balik peningkatan *vulnerability* (kerentanan) dan potensi. Untuk setiap krisis, selalu ada pemecahan yang negatif dan positif. (M.A & Takdir Alisyahbana, 2020)

Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam delapan tahapan perkembangan. Dalam bukunya *Childhood and Society*, Erikson menggambarkan bagaimana ego memperoleh kekuatan ketika berkembang melalui delapan tahap perkembangan psikososial yang terjadi sepanjang

hidup seseorang. Dari delapan tahapan tersebut, Erikson lebih menekankan pada masa remaja, karena masa tersebut merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Berikut adalah tahap perkembangan yang di lalui setiap manusia menurut Erikson:

Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Manusia

Sumber : Studi Dokumen (jurnal Sejarah dan Aliran Psikologi)

Developmental Stage	Basic Components
Infancy (0-1 tahun)	Trust vs Mistrust
Early Childhood (1-3 tahun)	Autonomy vs Shame, Dubt
Preschool Age (4-5 tahun)	Initiative vs Guilt
School Age (6 tahun - pubertas)	Industry vs Infeority
Adolescence (10-20 tahun)	Identity vs Identity Confusion
Young Adulthood (21-40 tahun)	Intimcy vs Isolation
Adulthood (41-60 tahun)	Generativity vs Stagnation
Senescence (60 tahun – meninggal)	Ego Integrity vs Despapier

- a. Tahap *trust versus Mistrust* (0 – 1 tahun) Pada tahap ini, anak akan bergantung kepada orang lain. Jika anak menerima kualitas pengasuhan yang cukup tinggi selama periode ini, anak akan mendapatkan kepercayaan dirinya dan mempercayai dunia ini.

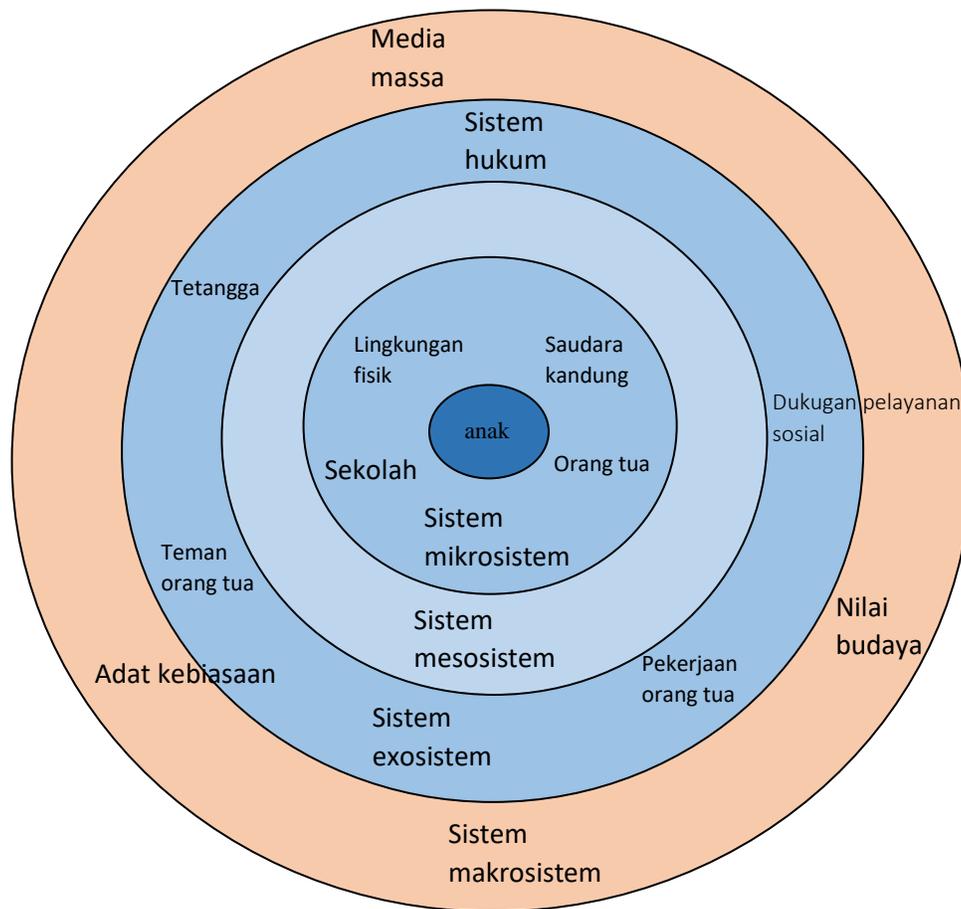
- b. Tahap *Autonomy versus Shame and doubt* (1-3 tahun). Pada tahap ini, anak dikaitkan dengan pencapaian pengendalian diri (toilet trained) dan awal penguasaan dunia luar. Identitas anak tergantung pada munculnya kemauan pada anak tersebut.
- c. Tahap *Initiative versus Guilt* (3-5 tahun) Anak lebih bebas bergerak, menggunakan bahasa yang efektif, dan mulai bisa membayangkan dirinya ingin menjadi apa. Di tahap ini, bermain dan berimajinasi sangat penting untuk anak.
- d. Tahap *Industry versus Inferiority* (6 tahun-pubertas) Anak mulai bersekolah dan menjadi semakin bergantung pada pendidikan untuk menguasai dunia.
- e. Tahap *Identity versus Identity diffusion* (10-20 tahun). Tahap ini menandai dimulainya masa remaja, di mana masalah akan membangun identitas pribadi yang stabil. Remaja mulai memelihara konsep diri yang stabil dan melihat bagaimana orang akan memandangnya. Hasil ideal pada tahap ini adalah kesetiaan pada diri sendiri dan orang lain.
- f. Tahap *Intimacy versus Isolation* (20-40 tahun). Setelah identitas terbentuk, maka orang tersebut akan menjadi dekat (intim) dengan orang lain, seperti dalam pernikahan, dan dia akan mempertahankan identitas diri agar tidak terisolasi dari orang lain
- g. Tahap *Generativity versus Stagnation* (40-60 tahun). Dibangun atas rasa diri yang kuat dan hubungan interpersonal yang baik, fokus seseorang beralih kepada kontribusi untuk masyarakat melalui kreativitas.

- h. Tahap *Integrity versus Despair* (60 tahun-meninggal). Semakin tua seseorang, ia akan merasakan kepuasan atau kegagalan tergantung pada dirinya di tahap sebelumnya (John G. Bejanfield, 2015).

Menurut Erikson, masyarakat khususnya keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan psikososial seorang individu. Peranan ini dimulai dari pola asuh orang tua hingga aturan/budaya masyarakat.

2.4.4.2 Teori Ekologi Urie Bronfenbrenner

Urie Bronfenbrenner (1917) mengusulkan pandangan tentang perkembangan anak yang sangat berorientasi lingkungan (John. W. Santrock, 2003). Teori ekologi menurut Urie Bronfenbrenner adalah suatu pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang mana terdiri dari lima sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial (social agents) yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Menurut Urie Bronfenbrenner, teori ekologi menjelaskan perkembangan anak-anak sebagai hasil interaksi antara alam sekitar dengan anak-anak tersebut. Teori Sistem ekologis disebut juga “Pembangunan dalam Konteks”. Ada lima sistem dalam teori ekologi Urie Bronfenbrenner, yaitu : Mikrosistem, Mesosistem, Eksosistem, Makrosistem dan Kronosistem.



Gambar 2. 1 Sistem Teori Perkembangan

Sumber : Studi Dokumen (jurnal membangun karakter melalui sistem kontrol sosial)

1. Mikrosistem

Adalah sebuah pola aktivitas, aturan dan hubungan dalam sebuah tata-situasi (*setting*) seperti rumah, sekolah, tempat kerja dan lingkungan, dimana seseorang berfungsi sebagai tangan pertama dan terjadi dalam sehari-hari. Melalui mikrosistemlah pengaruh-pengaruh yang lebih jauh, seperti institusi sosial dan nilai-nilai kultural, mencapai individu dalam proses perkembangan.

2. Mesosistem

Adalah interaksi antar dua atau lebih mikrosistem yang mengandung individu yang sedang berkembang. Sistem tersebut bisa jadi mengandung hubungan antara rumah dengan sekolah (seperti pertemuan orang tua - guru), atau antara keluarga dengan kelompok teman sebaya. Memerhatikan messosystem dapat mengingatkan kita kepada perbedaan cara bertindak dari seseorang dalam tata-situasi yang sama.

3. Eksosistem

Eksosistem dalam teori ekologi Bronfenbrenner dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain, dimana individu tidak memiliki peran yang aktif, mempengaruhi apa yang individu alami dalam konteks yang dekat.

4. Makrosistem

Makrosistem terdiri dari keseluruhan pola kultural, seperti yang dipelajari Mead (1972): nilai dominan, keyakinan, adat, sistem ekonomi dan sosial kultur dan subkultur, yang kemudian melalui berbagai cara tersarikan dalam kehidupan keseharian individu. Misalnya: apakah anak yang tumbuh dalam sebuah keluarga besar sangat dipengaruhi oleh makrosistem kultur.

5. Kronosistem

Kronosistem meliputi pemolaan peristiwa-peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan-keadaan sosiohistoris. Misalnya, dengan mempelajari dampak perceraian terhadap anak-anak. (Purwandari, 2006)

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak tidak akan terpisahkan dari kelima sistem interaksi seperti tersebut di atas. Pada proses interaksi inilah banyak institusi

yang akan mensosialisasikan nilai-nilai dan pengetahuan kepada anak. Oleh karena itu, orangtua tidak dapat dengan sempurna menginginkan anaknya menjadi seperti yang ia inginkan, karena banyak institusi yang turut berperan dalam proses sosialisasi di era global ini. Sistem yang melingkupi individu. Dengan kata lain karakter tidak bisa dibentuk oleh orang tua saja. Melainkan oleh sistem, yaitu sistem yang dimulai dari mikrosistem sampai kronosistem, minimal sampai dengan sistem makro. Dari penjelasan tentang sistem interaksi siatas, maka penelitian ini lebih tertuju pada sistem mikro, karena seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa penelitian ini meneliti tentang pola asuh orang tua dengan anak remajanya (Berry, J.W; Pootinga, Y.H; Segall, M.H dan Dasen, 2012).

2.5 Self Harm

Menurut Larsen (2009) Perilaku melukai diri (*Self Harm*) adalah setiap perilaku sengaja yang bukan termasuk bunuh diri yang menyebabkan luka pada tubuh dengan tujuan melepaskan penderitaan emosional. Sebagai salah satu bentuk melukai diri, menyayat diri (*self cutting*) adalah perilaku melukai diri dengan menggunakan objek benda tajam untuk membuat luka fisik sebagai kompensasi untuk luka batin yang dialaminya.

Menyakiti diri sendiri atau *Self-Harm* menjadi salah satu fenomena kesehatan jiwa sebagai mekanisme koping maladaptif melalui penggunaan rasa sakit fisik untuk mengatasi tekanan emosional (Woodley, 2020). Perilaku *Self-Harm* adalah tindakan menyakiti diri menggunakan segala cara dengan atau tidak diikuti keinginan untuk bunuh diri (NICE, 2011). Hal ini merupakan mekanisme koping yang tidak baik,

namun beberapa dewasa muda menjadikan *Self-Harm* cara objektif dan mampu mengakibatkan kecanduan untuk melakukannya kembali (Faried, 2018).

Perilaku melukai diri sendiri hingga upaya bunuh diri ini bisa jadi merupakan bentuk dari penyaluran emosi yang dilakukan dengan cara negatif. Penyaluran emosi dengan cara negatif ini menjadi bentuk mekanisme coping yang digunakan individu untuk mengatasi rasa sakit secara emosional atau menghilangkan rasa kekosongan kronis dalam diri dengan memberikan sensasi tersebut ke dalam diri dengan tujuan untuk membantu diri sendiri (Fox, C., & Hawton, 2004). Penyaluran emosi negatif dilakukan dengan cara menyakiti diri secara sengaja serta dalam kondisi sadar tanpa berniat untuk bunuh diri dengan mencakar atau menyayat bagian tubuh. Perilaku melukai diri secara sengaja dan dilakukan dalam kondisi sadar disebut sebagai *deliberate self-harm* (DSH).

Individu yang melakukan perilaku melukai diri sendiri biasanya melaporkan mengalami perasaan hampa, cenderung mengasingkan diri, dan diiringi pula dengan munculnya emosi negatif yang kuat dan berlebihan (Gratz, 2003).

Gratz, Conrad & Roemer (2002) menambahkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai perilaku melukai diri sendiri fokus pada faktor risiko dari adanya pengalaman traumatis masa kecil seperti adanya pelecehan seksual, pelecehan fisik, penelantaran dan kehilangan masa anak-anak, faktor risiko individu, dan hubungan antara orangtua dan anak. Tumbuh dari keluarga yang memperlakukan anak dengan buruk dapat menyebabkan pengalaman masa anak-anak dipenuhi oleh trauma yang berdampak pada kehidupan anak di masa mendatang. Kesulitan atau pengalaman

traumatis yang terjadi pada masa anak-anak. (Gratz, K. L., Conrad, S. D., & Roemer, 2002).

2.6 Depresi

Menurut Radloff depresi merupakan gangguan mood yang ditandai dengan simtom–simtom seperti suasana hati yang dirasakan negatif, gejala psikologis yang berkaitan dengan keadaan tubuh, perasaan yang dirasa positif oleh individu, serta perasaan negatif yang dirasakan individu berkaitan dengan perilaku orang lain. Depresi pada remaja bukan hanya sekedar perasaan stress dan juga sedih yang hanya datang dan pergi begitu saja, melainkan merupakan sebuah kondisi yang juga cukup serius yang dimana dapat mempengaruhi perilaku, emosi dan juga cara berfikir remaja itu sendiri dan juga sifat permanen yang membutuhkan penanganan yang cukup serius dari seorang profesional untuk mengatasinya, berawal dari kondisi stress tersebut lah jika tidak diatasi dengan serius maka akan masuk kedalam fase depresi.

(Sibarani et al., 2021).

Dari defnisi diatas dapat disimpulkan bahwa depresi juga merupakan gangguan perasaan atau emosi yang meliputi suasana murung, sedih, tidak bahagia bahkan perasaan putus asa yang dialami oleh seseorang yang apabila perasaan negatif itu dibiarkan tanpa ditangani dengan serius, maka akan semakin parah dan dapat berakhir dengan tindakan bunuh diri.

Perilaku *self harm* yang dilakukan oleh seseorang biasanya diawali dengan perasaan depresi karena masalah yang dialami sebelumnya dan ketika orang tersebut

tidak dapat mengendalikan dan tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya dan perasaan depresi itu tidak ditangani dengan serius, pada akhirnya dia akan merasa putus asa sehingga dia lebih melakukan perilaku *self harm* yang dimana itu membuat dia merasa lebih tenang, dan ketika *self harm* itu dibiarkan maka akan bertambah parah dan pada akhirnya akan melakukan tindakan bunuh diri.